

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Amiruddin, dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arba, H. M. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Dianta, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Pelindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harsono, Boedi. *Masalah-masalah Aktual di Bidang Pertanahan yang Menyangkut Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*. Majalah Masalah-masalah Hukum, 1992.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Limbong, Bernhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Margaretha Pustaka, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mudjiono. *Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 1982.
- Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rubaie, Achmad. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: PUSDERANKUM dan Bayumedia Publising, 2007.
- Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*. Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sarjita. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah* (Keppres No. 34 Tahun 2003). Yogyakarta: Tugu Jogja, 2005.
- Soekanto, soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soemitro Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pengadaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumardjono. *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Bogor: Grafika Merdi Yuana, 2017.
- Sumardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Sumardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Kompas, 2006.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Pembebasan Tanah Untuk Membangun Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta. Permata Aksara. 2015.
- Syahrums, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah, 2005.
- Widodo. *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

JURNAL

- Agus Suntoro, "Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Ham", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5, No.1, (2019): 18-19.
- Enggartiaso, Deo., Setiowati Setiowati., & Martanto Rochmat. Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport. *Tunas Agraria*. 4, No.1, (2021): 40-53.
- Fathoni, M. Yazid. Lingkup Dan Implikasi Yuridis Pengertian "Agraria" Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Justitia Jurnal Hukum*. 2, No. 2, (2018): 354-371.
- Pattiha, D. N. A., Pietersz, J. J., & Uktolseja, N. Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *PATTIMURA Law Study Review*, 1, No.1, (2023): 14-21.
- Suardana, I Made, Kosasih Johannes Ibrahim, Sukandia I Nyoman. Legal Protection of Citizens/Residents Land Rights in Relation to the Badung Regional Regulation on the Gatot Subroto-Canggu Road Development Plan. *International Journal of Multidisciplinary*

Research and Analysis. 6, No. 8, (2023): 3664-3668.

Suhadi. Legal Protection of Village Land for Infrastructure Development in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)*, 363, (2019): 221-224.

SKRIPSI

Ekasetya, Mohammad Perindra. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2015.

Saputra, Riki Wahyu. Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Kasus Di Kuta Lombok Tengah), 2020.

Suprianto, Dedi. Pelindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal ASING Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Angka 2 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Angka 3 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

INTERNET

<https://www.cnbcindonesia.com/news/202311281348414492673/kebijakan-infrastruktur-2024-dukung-modernisasi-pemerataan> diakses 3 Maret 2024 pukul 03:11

<https://penapewarta.com/rencana-pembangunan-jalan-baru-senayan-lamusung-mulai-disiolisasikan-pada-warga-2/> diakses 25 Februari

- 2024 pukul 22:54
<https://prokopim.sumbawabaratkab.go.id/sejarah-singkat/#> diakses 1
 Maret 2024 pukul 22:15
<https://repository.ut.ac.id/1973/1/41811.pdf> Kanwil BPN Prov. NTB
 (2012). *Monitoring dan Evaluasi Sengketa Pertanahan se-Pulau
 Sumbawa*. Mataram. diakses 1 Maret 2024 pukul 23:03
[https://www.kec-seteluk.go.id/berita/sosialisasi-ded-pembangunan-jalan-
 senayan-tapir-lamusung-tahun-2023](https://www.kec-seteluk.go.id/berita/sosialisasi-ded-pembangunan-jalan-senayan-tapir-lamusung-tahun-2023) diakses 25 Februari 2024
 pukul 23:59
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021> diakses 6
 Juni 2024 pukul 23:45
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161849/pp-no-19-tahun-2021> diakses 6
 Juni 2024 pukul 00:39
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161849/pp-no-19-tahun-2021> diakses 6
 Juni 2024 pukul 00:58
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/42569/perpres-no-36-tahun-2005>
 diakses 6 juni 2024 pukul 01:09
[https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pemprov-kaltim-bayar-ganti-
 untung-lahan-ring-road-ii](https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pemprov-kaltim-bayar-ganti-untung-lahan-ring-road-ii) diakses 9 Juni 2024 pukul 02:25
[https://jdih.maritim.go.id/infografis/pemberian-ganti-kerugian-
 pembebasan-kepemilikan-hak-atas-tanah](https://jdih.maritim.go.id/infografis/pemberian-ganti-kerugian-pembebasan-kepemilikan-hak-atas-tanah) diakses 9 Juni 2024 pukul
 02:42 WIB

HASIL WAWANCARA

- Hasil Wawancara dengan Firmansyah Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Tata Ruang pada 25 Februari 2024 pukul 15:30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Naf'an Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Tata Ruang pada 27 Februari 2024 pukul 08:13 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Tata Ruang pada 19 April 2024 pukul 09:45 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Danding Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Tata Ruang pada 19 April 2024 pukul 15:10 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Firmansyah Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Tata Ruang pada 19 April 2024 pukul 14:25 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Asmini Pemilik Tanah pada 28 April 2024 pukul 10:00 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Irfan Jaya Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Tapir pada 28 April 2024 pukul 11:10 WITA.
- Hail Wawancara dengan Muhammad Ferbani Staf Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Tata
Ruang pada 28 April 2024 pukul 12:05.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA